



## **PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PENDIDIKAN DASAR**

**Nuraini**

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sebayan-Sambas Kalimantan Barat  
E-mail: [nurainiiaissambas@gmail.com](mailto:nurainiiaissambas@gmail.com)

### **Abstract**

*Islamic education is divided into three terms. First "Islamic Education" as a source of value is a type of education whose establishment and implementation is driven by the desire and enthusiasm of ideals to embody Islamic values, both reflected in the name of the institution, and in the activities that are held. Secondly, "Islamic education" as a field of study, as a science, and treated as another science is a type of education that pays attention as well as making Islamic teachings knowledge for the study programs that are held. Third, the type of education that includes both the above understanding. Here the word Islam is placed as a source of value as well as a field of study offered through study programs that are held. The development of Islamic Education places more emphasis on the aspects of faith and belief in religion and subsequently develops an Islamic education orientation that involves socio-political and economic issues (worldliness) which then encourages the adjustment of Islamic education, curriculum, institutions and teaching systems*

**Keyword:** Education System, Islamic Religion, Early Education

### **Abstrak**

*Pendidikan Islam terbagi dalam tiga pengertian. Pertama "Pendidikan Islam" sebagai sumber nilai adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kedua, "Pendidikan Islam" sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Pengembangan Pendidikan Islam lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama dan selanjutnya mengembangkan orientasi pendidikan Islam yang menyangkut masalah-masalah sosial politik dan ekonomi (keduniawian) yang kemudian mendorong dilakukan penyesuaian pendidikan Islam, kurikulum, kelembagaan dan sistem pengajarannya.*

**Kata Kunci:** Sistem Pendidikan, Agama Islam, Pendidikan Dasar

Diterima: 07 Januari 2020 | Direvisi: 22 Januari 2020 | Disetujui: 27 Januari 2020

© 2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia

## **Pendahuluan**

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, dan menjadi cermin kepribadian masyarakatnya. Dalam konteks ini Mohammad Noer Syam dalam bukunya *Filsafat Pendidikan*, mengemukakan bahwa: "Hu-

hubungan masyarakat dengan pendidikan menampakkan hubungan korelasi positif. Artinya, pendidikan yang maju dan modern akan menghasilkan masyarakat yang maju dan modern pula. Sebaliknya pendidikan yang maju dan modern hanya ditemukan dan diselenggarakan oleh masyarakat maju (Muhammad Noer Syam, 1986: 348). Pembaharuan sistem pendidikan dapat diilhami oleh norma-norma agama, kebijakan politik, dan aspirasi masyarakat. Norma-norma yang mendasari pembaruan suatu sistem pendidikan hendaknya berlandaskan pada suatu atau seperangkat sistem nilai universal yang selanjutnya dijabarkan pada kaidah-kaidah pendidikan yang mencerminkan yaitu: tanggung jawab kepada Tuhan YME, tanggung jawab kepada perkembangan potensi dan riil manusia, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada pemeliharaan, pengawetan, pengembangan, dan pendayagunaan alam sekitar secara proporsional (Jusuf Amir Faesal, 1995: 51).

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam dapat mencakup: kepala sekolah/madrasah atau pimpinan perguruan tinggi yang mengelola dan mengembangkan aktivitas kependidikannya yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Memang bangsa yang maju selalu diawali dengan keberhasilan di bidang pendidikannya, sebab pendidikanlah yang mencetak sumber daya manusia (SDM) yang pada prinsipnya sebagai penggerak roda pemerintahan. Kalau demikian, mustahil negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman dan Perancis maju tanpa dimulai dengan keberhasilan di bidang pendidikan (Hasbullah, 1996, 27).

Dunia pendidikan Islam dengan pendidikan pada umumnya, kadang-kadang memang mempunyai persamaan dan kadang-kadang mempunyai perbedaan. Persamaan akan timbul karena sama-sama berangkat dari dua arah pendidikan yakni dari diri manusia sendiri yang memang fitrahnya untuk melakukan proses pendidikan, kemudian adalah dari budaya yakni masyarakat yang memang menginginkan usaha warisan nilai, maka semuanya memerlukan pendidikan (Khalijah Hasan, 1995: 49).

Mengenai pendidikan agama itu sendiri (Islam) pada dasarnya cukup mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, apalagi bila dilihat dari dimensi historis, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang sekuler, diketahui bahwa pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia, dan hal ini berlangsung berabad-abad lamanya. Karena itulah dalam perjalanan dan perkembangan berikutnya pendidikan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kendatipun dalam operasionalnya senantiasa mengalami pasang surut dengan segala dinamikanya. Tetapi yang jelas pendidikan agama merupakan mata pelajaran pokok atau wajib dari saruan pendidikan yang diajarkan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Pendidikan nasional menggalakkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani dan iman, berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang adanya penekanan di bidang pembentukan manusia seutuhnya baik jasmani maupun rohani dalam sistem pendidikan nasional merupakan ciri pendidikan Islam. Karena itu, dalam kurikulum pendidikan, pendidikan keagamaan merupakan bagian terpadu yang dimuat dalam kurikulum pendidikan maupun yang melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari pendidikan nilai. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama akan selalu memberikan corak dan warna kepada pendidikan nasional di Indonesia

## **Pembahasan**

### **Pengertian Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam menurut Zarkowi Soejoeti terbagi dalam tiga pengertian. Pertama, “Pendidikan Islam” adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjewantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan (M. Ali Hasan dan Mukti Ali, 2003: 45).

Ciri khas pendidikan Islam itu ada dua macam : (1) Tujuannya : Membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. (2) Isi pendidikannya : ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al Qur’an yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Teori-teori pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia secara umum mendefinisikan pendidikan Islam dalam dua tataran : idealis dan pragmatis. Pada tataran idealis, pendidikan Islam diandaikan sebagai suatu sistem yang independen (*eksklusif*) dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam. Definisi ini secara kuat dipengaruhi oleh literatur Arab yang masuk ke Indonesia baik dalam bentuk teks asli, terjemahan, maupun sadurannya. Sedangkan pada tataran pragmatis, pendidikan Islam ditempatkan sebagai identitas (ciri khusus) yang tetap berada dalam konteks pendidikan nasional. Perkembangan-perkembangan aktual di Indonesia khususnya selama tiga dekade terakhir sangat mempengaruhi munculnya definisi pragmatis ini (Hasbullah, 1995: 46).

Penulis-penulis Indonesia kontemporer berusaha menjelaskan definisi pendidikan Islam dengan melihat tiga kemungkinan hubungan antara konsep pendidikan dan konsep Islam. Dilihat dari sudut pandang kita tentang Islam yang berbeda-beda, istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami sebagai :

1. Pendidikan (menurut) Islam,
2. Pendidikan (dalam) Islam,
3. Pendidikan (agama) Islam.

Hubungan yang pertama, pendidikan Islam bersifat normatif, sedang dalam hubungan yang kedua, pendidikan Islam lebih bersifat sosio-historis. Adapun dalam hubungan yang ketiga, pendidikan Islam lebih bersifat proses-operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam kerangka akademik, pengertian yang pertama merupakan lahan filsafat pendidikan Islam, dan pengertian yang ketiga merupakan kawasan ilmu pendidikan Islam teoritis

### **Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional, secara implisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Kenyataan seperti ini dapat kita pahami dari hasil rumusan seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam ditujukan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Dalam hal ini Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (Ahmad D. Marimba, 1986: 23).

Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, tampaknya ada dua dimensi kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu:

1. Dimensi transendental (lebih dari hanya sekedar ukhrawi) yang berupa ketakwaan, keimanan dan keikhlasan.
2. Dimensi duniawi melalui nilai-nilai material sebagai sarannya, seperti pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, keintelektualan dan sebagainya.

Keberhasilan pendidikan Islam akan membantu terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Juga sebaliknya keberhasilan pendidikan nasional secara makro turut membantu pencapaian tujuan pendidikan Islam. Sebab itu keberadaan lembaga pendidikan Islam oleh pemerintah dijadikan mitra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Melalui proses penyusunannya sejak

tahun 1945, ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sampai tahun 1989, tampaknya undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini masih berjalan. Karenanya, masalah-masalah pendidikan terutama yang menyangkut kurikulum pendidikan, maka semuanya di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tersebut merupakan wadah formal terintegrasi-nya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus berkembang.

Adanya peluang dan kesempatan untuk berkembangnya pendidikan Islam secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal, seperti berikut ini:

1. Di dalam pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kenyataannya tidak bisa dipungkiri, bahwa pendidikan Islam baik sebagai sistem maupun kelembagaannya, merupakan warisan budaya bangsa, yang berurat akar pada masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan Islam akan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
2. Pada pasal 4 diungkapkan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Apa yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut terutama yang menyangkut nilai-nilai dan aspek-aspeknya, sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, perkembangan pendidikan Islam akan mempunyai peran strategis dan menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut.
3. Selanjutnya pada pasal 10 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Menurut ajaran Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, yang berperan besar dalam upaya pembentukan

## **Fungsi Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Secara eksplisit fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1989, yang menyebutkan “pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iaman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional (Depag RI, 1992: 41). Dari rumusan tersebut, tampaknya terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada pasal 4 UU Nomor 2 tahun 1989 yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa...” Upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itulah maka pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah (Hasbullah, 2001: 117).

Gambaran tentang peranan madrasah dan pondok pesantren adalah sebagai berikut:

1. Madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, serta kemampuannya untuk memasuki pelosok daerah terpencil disamping kemampuannya untuk tetap tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan yang modern dan sangat maju.
2. Madrasah dan pondok pesantren sebagian besar adalah perguruan swasta yang berkemampuan tinggi untuk berswakarsa dan berswakarya dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang diatas kemampuan kekuatan sendiri, dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat pendukungnya.
3. Madrasah dan pondok pesantren yang memiliki ciri khas sebagai pusat pendidikan, pengembangan dari penyebaran agama Islam, diharapkan dan telah membuktikan diri dapat menghasilkan keluaran atau out put yang berkualitas dan potensial untuk menjadi pendidik, khususnya di bidang pendidikan agama Islam.
4. Madrasah dan pondok pesantren memiliki potensi yang cukup besar untuk bersama-sama satuan pendidikan lainnya di dalam system pendidikan nasional untuk menuntaskan wajib belajar tingkat SLTP dan pelaksana pendidikan dasar 9 tahun. Dan atas dasar inilah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah merupakan lembaga pendidikan dasar (Hasbullah, 2001, 178).

Adapun madrasah umumnya didirikan atas inisiatif masyarakat Islam yang tujuan umumnya adalah untuk mendidik para peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 28 tahun 1990 dimana pada



pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang dikelola oleh Departemen Agama disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Dengan kenyataan ini, tugas dan fungsi MI dan MTs menjadi ganda, yaitu: Sebagai sekolah pendidikan Islam, Sebagai sekolah pendidikan dasar.

Keberdayaan fungsi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah makin kuat dan penting. Dengan keadaan yang demikian, orang tidak bisa lagi menomor duakan lembaga-lembaga pendidikan agama, terlebih-lebih bila lembaga pendidikan agama terutama madrasah, mampu memacu diri dengan berupaya maksimal meningkatkan kualitas dalam berbagai aspeknya, tidak mustahil madrasah nantinya akan menjadi alternative pertama, pilihan masyarakat untuk memasukan anak-anaknya. Sebab bagaimanapun disaat globalisasi melanda dunia seperti sekarang ini, nilai-nilai etik dan moral sudah mulai luntur dan bergeser. Dalam konteks ini madrasah sangat strategis untuk membendung arus demoralisasi yang sangat merugikan Ahmad D. Marimba, 1986: 179). Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan dan terutama menyiapkan peserta didik menjadi subyek yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokrasi, dan profesional pada bidangnya masing-masing.

Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan tidak akan bermutu baik atau unggul dengan sendirinya, melainkan melalui berbagai upaya peningkatan mutu pendidikannya. Sekolah dasar merupakan suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Sekolah dasar merupakan bagian dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama, dengan demikian sekolah dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (Depag RI, 2005: 1).

### **Pengembangan Sistem Pendidikan Islam pada Pendidikan Dasar**

Beberapa model dalam pengembangan sistem pendidikan sebagaimana uraian berikut:

#### **1. Model Dikotomis**

Pada model ini, aspek kehidupan dipandangan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Dengan demikian, pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non agama, pendidikan keislaman dengan nonkeislaman, demikian seterusnya. Pandangan semacam itu akan berimplikasi pada pengembangan pendidikan agama Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani

yang terpisah dari kehidupan jasmani. Pendidikan (agama) Islam hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sebagainya dianggap sebagai (Muhaimin, 2009: 60). Urusan duniawi yang menjadi garapan bidang pendidikan nonagama. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, yaitu istilah pendidikan agama dan nonagama. Sikap dikotomi (dualisme) ini terkait erat dengan world view umat Islam dalam memandang dan menempatkan dua sisi ilmu, yaitu 'ilm al-dînîyah dan 'ilm ghair al-dînîyah.

Demikian pula pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat keagamaan yang normatif, doktriner dan absolutis. Peserta didik diarahkan untuk menjadi pelaku (actor) yang loyal, memiliki sikap commitment (keberpihakan), dan dedikasi (pengabdian) yang tinggi terhadap agama yang dipelajari. Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis-kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman, sehingga perlu ditindih oleh pendekatan yang normatif dan doktriner tersebut. Pola dikotomi yang demikian, telah menimbulkan sejumlah efek negatif. Abdurrahman Mas'ud dalam salah satu penelitiannya sebagaimana dikutip Ma'arif menunjukkan bahwa cara pandang yang dikotomik tersebut akhirnya telah membawa kemunduran dalam dunia pendidikan Islam. Di antaranya adalah menurunnya tradisi belajar yang benar di kalangan muslim, layunya intelektualisme Islam, melanggengkan supremasi ilmu-ilmu agama yang berjalan secara monotomik, kemiskinan penelitian empiris serta menjauhkan disiplin filsafat dari pendidikan Islam (Bustaniddun Agus, 1999: 12). Agama mengasumsikan atau melihat suatu persoalan dari segi normatif, sedangkan sains meneropongnya dari segi obyektifnya. Agama melihat problematika dan solusinya melalui petunjuk Tuhan, sedangkan sains melalui eksperimen dan rasio manusia. Karena agama diyakini sebagai petunjuk Tuhan, kebenaran dinilai mutlak, sedangkan kebenaran sains relatif. Agama banyak berbicara yang ghaib sedangkan sains hanya berbicara mengenai hal yang empiris.

## 2. Model Mekanisme

Model mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa berkonsultasi atau tidak.

Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetik, nilai biofisik, dan lain-lain. Demikian juga dalam proses pendidikan dibutuhkan sistem nilai agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan arah yang pasti, karena berpedoman pada garis kebijaksanaan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai fundamental, misalnya nilai agama, ilmiah, sosial,



ekonomi, ini sangat bertentangan dengan konsep Islam sendiri. Sebab Islam memiliki ajaran integralistik. Islam tidak mengajarkan bahwa urusan dunia tidak terpisah dengan urusan akhirat. Ketiga, disintegrasi sistem pendidikan Islam hingga saat ini boleh dikatakan kurang terjadi perpaduan (usaha integrasi). Tidak adanya hubungan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Bahkan hal itu ditunjang juga oleh kesenjangan antara wawasan guru agama dan kebutuhan anak didik, terutama di sekolah umum. Keempat, inferioritas para pengasuh lembaga pendidikan Islam (Samsul Maarif, 2007: 15).

Nilai adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia atau masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik dan benar dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Di samping itu, ada kecenderungan alami di dalam diri manusia ke arah kebenaran dan wujud suci tertentu, yang juga bisa berkembang lebih jauh (Murthada Mutahhari, 1984: 82). Dalam agama terkandung nilai-nilai yang menentukan bukan saja terhadap cara berpikir, akan tetapi juga terhadap pandangan hidup, sikap hidup dan perilaku hidup. Dalam nilai sosial, masyarakat tradisional mengutamakan kehidupan kolektif atau kekerabatan. Dapat dikatakan, masyarakat tradisional lebih berorientasi pada kohesivitas kehidupan. Sesuai dengan kerangka nilai semacam itu, pola hubungan sosial di antara mereka diartikulasikan dalam bentuknya yang komunal dan personal (Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994: 116). Oleh karena itu, jika kita membahas nilai-nilai pendidikan, akan jelas melalui rumusan dan uraian tentang tujuan pendidikan, sebab di dalam rumusan tujuan pendidikan itu tersimpul dari semua nilai pendidikan yang hendak diwujudkan di dalam pribadi peserta didik. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dari aspek-aspek kehidupan lainnya.

Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai lainnya kadang-kadang bersifat horizontal-lateral (*independent*) atau bersifat lateralsekuensial, tetapi tidak sampai pada vertikal linier. Relasi yang bersifat horizontal-lateral (*independent*), mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independen, dan tidak saling berkonsultasi. Relasi yang bersifat lateral-sekuensial, berarti di antara masing-masing mata pelajaran tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi. Sedangkan relasi dalam nilai ekonomi, masyarakat tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dengan insentif yang bersifat moral dan sosial. Kecenderungan ini bisa saja terjadi karena tingkat persaingan masyarakat dalam bidang sosioekonomi tidak begitu ketat, dan yang terpenting, ukuran kehidupan masyarakat belum ditentukan dengan tingkat pemilikan benda-benda ekonomi.

Vertikal linier berarti mendudukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat mata pelajaran yang lain termasuk pengembangan nilai insani yang mempunyai relasi vertikal linier dengan agama. Dalam konteks tersebut, selama ini di sekolah-sekolah masih ada proses sekularisasi ilmu, yakni pemisahan

antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan seolah-olah hanya merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama, sementara mata pelajaran yang lain mengajarkan ilmunya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan masalah nilai keimanan dan ketakwaan. Dampak berupa gejala kegersangan batin dan kejiwaan modern adalah konsekuensi dari hal itu. Bahkan pendidikan di dunia muslim pun berurat berakar mengadopsi konsep sekuler yang dikotomis dan tidak utuh. Model tersebut tampak dikembangkan pada sekolah yang di dalamnya diberikan seperangkat mata pelajaran atau ilmu pengetahuan, yang salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan agama yang hanya diberikan 2 atau 3 jam pelajaran per minggu, dan didudukkan sebagai mata pelajaran, yakni sebagai upaya pembentukan kepribadian yang religius. Kebijakan ini sangat prospektif dalam membangun watak, moral dan peradaban bangsa yang bermartabat. Namun demikian, dalam realitasnya pendidikan agama Islam sering termarginalkan, bahkan guru PAI di sekolah pun kadang-kadang terhambat karirnya untuk menggapai jabatan fungsional tertinggi, karena tidak tersedia program studi sebagai induknya.

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum, hlm. Kebijakan tentang pembinaan pendidikan agama Islam secara terpadu di sekolah umum misalnya, antara lain menghendaki agar pendidikan agama dan sekaligus para guru agamanya mampu memadukan antara mata pelajaran agama dengan pelajaran umum. Kebijakan ini akan sulit diimplementasikan pada sekolah yang cukup puas hanya mengembangkan pola relasi horizontal-lateral. (independent). Barangkali kebijakan tersebut relatif mudah diimplementasikan pada lembaga pendidikan yang mengembangkan pola lateral-sekuensial. Hanya saja implikasi dari kebijakan tersebut adalah para guru agama harus menguasai ilmu agama dan memahami substansi ilmu-ilmu umum, sebaliknya guru umum dituntut untuk menguasai ilmu umum (bidang keahliannya) dan memahami ajaran dan nilai-nilai agama. Bahkan guru agama dituntut untuk mampu menyusun buku-buku teks keagamaan yang dapat menjelaskan hubungan antara keduanya (Syamsul Maarif, 2007: 37-38).

### 3. Model Organism/Sistemik

Meminjam istilah biologi, organism dapat berarti susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan. Dalam konteks pendidikan Islam, model organism bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama (Muhaimin, 2009: 67). Pandangan tersebut menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari fundamental doctrines dan fundamental values yang tertuang dan terkandung dalam al-Qur'an dan alSunnah al-Shahîhah sebagai sumber pokok. Ajaran dan nilai-nilai ilahi didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insani. Nilai ilahi me-

rupakan nilai yang dititahkan Tuhan melalui para rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman dan adil yang diabdikan dalam wahyu ilahi. Nilai-nilai ilahi selamanya tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat serta tidak berkecenderungan untuk merubah mengikuti selera hawa nafsu manusia dan berubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan tuntutan individual. Konfigurasi dari nilai-nilai ilahi mungkin berubah, namun secara instrinsiknya tetap tidak berubah. Hal ini karena bila instrinsik nilai tersebut berubah, maka kewahyuan (revillatif) dari sumber nilai yang berupa kitab suci al-Qur'an akan mengalami kerusakan (Arifin, 1994: 121).

Nilai insani tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai ini bersifat dinamis. Sedangkan keberlakuan dan yang mempunyai hubungan vertikal-linier dengan nilai ilahi/agama (Muhaimin, 2009: 67). Nilai ilahi dalam aspek teologi tak pernah mengalami perubahan, sedangkan aspek amaliahnya mungkin mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan. Sebaliknya nilai insani selamanya mengalami perkembangan dan perubahan menuju ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Tugas pendidikan adalah memadukan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama secara selektif, inovatif, dan akomodatif guna mendinamisasikan perkembangan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan, tanpa meninggalkan nilai fundamental yang menjadi tolok ukur bagi nilai-nilai baru. Melalui upaya semacam itu, maka sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kematangan profesional, dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama.

Paradigma tersebut tampaknya mulai dirintis dan dikembangkan dalam sistem pendidikan di madrasah, yang dideklarasikan sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, atau sekolah-sekolah (swasta) Islam unggulan. Kebijakan pengembangan madrasah berusaha mengakomodasikan tiga kepentingan utama, yaitu: pertama, sebagai wahana untuk membina roh atau praktik hidup keislaman; kedua, memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah, sebagai pembinaan warga negara yang cerdas berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif; dan ketiga, mampu merespon tuntutan-tuntutan masa depan dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kebenarannya relatif (nisbi) yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya.

Karena kecenderungan tradisi tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan tata nilai, kenyataan ikatan-ikatan tradisional sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia (Zuhairini, 1992: 56). Siapan memasuki

era globalisasi, industrialisasi maupun era informasi. Maka dari itu, model organisme/ sistemik dapat diimplementasikan dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah, mengingat kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatankegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. Selain itu, metodologi pendidikan agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan serta terbatasnya bahan-bahan bacaan keagamaan. Buku-buku paket pendidikan agama saat ini belum memadai untuk membangun kesadaran beragama, memberikan keterampilan fungsional keagamaan dan mendorong perilaku bermoral dan berakhlak mulia pada peserta didik (Muhaimin, 2009:68).

Penutup Kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatankegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. Selain itu, metodologi pendidikan agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan serta terbatasnya bahan-bahan bacaan keagamaan. Buku-buku paket pendidikan agama saat ini belum memadai untuk membangun kesadaran beragama, memberikan keterampilan fungsional keagamaan dan mendorong perilaku bermoral dan berakhlak mulia pada peserta didik. Untuk itu, diperlukan pengembangan pendidikan agama yang lebih kondusif dan prospektif terutama di sekolah. Model pengembangannya perlu direkonstruksi, dari model yang bersifat dikotomis dan mekanisme ke arah model organisme atau sistemik. Hanya saja untuk merombak model tersebut diperlukan kemampuan guru PAI dan political will dari para pengambil kebijakan, termasuk di dalamnya para pimpinan lembaga pendidikan itu sendiri.

### **Simpulan**

Pendidikan Islam terbagi dalam tiga pengertian. *Pertama* “Pendidikan Islam” sebagai sumber nilai adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. *Kedua*, “Pendidikan Islam” sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan.

Pengembangan Pendidikan Islam lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama dan selanjutnya mengembangkan orientasi pendidikan Islam

yang menyangkut masalah-masalah sosial politik dan ekonomi (keduniawian) yang kemudian mendorong dilakukan penyesuaian pendidikan Islam, kurikulum, kelembagaan dan sistem pengajarannya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus berkembang.

Fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 1989, yang menyebutkan “pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional

### Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin. (1999). *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Studi Banding antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam* Jakarta: Gema Insani.
- Arifin. (1994). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal, Ibrahim, (2009). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- D. Marimba, Ahmad. (1986). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Depag RI. (2005). *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Gema Insani Press
- Departemen Agama RI. (1992). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dirjen. Binbaga Islam.
- Faesal, Jusuf Amir, (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Hasan, Chalidjah. (1995). *Kajian Perbandingan Pendidikan*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hasan, M. Ali dan Mukti Ali. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- (2001). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hatta, Muhammad. (1979). *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, Jakarta: Mutiara.
- Maarif, Syamsul. (2007). *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mutahhari, Murtadha. (1984). *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama* Bandung: Mizan.

Noer Syam, Mohammad. (1986). *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Soekarno dan Ahmad Supardi. (1983). *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Angkasa).

Tobroni dan Syamsul Arifin. (1994). *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Yogyakarta: SI Press.

Zuhairini, et.al. (1992). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.